

**PROGRAM UPPKA DALAM UPAYA  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN**

*Oleh :*

*Ir. Sugiah M. Mahfud, MS.  
Ir. Sarwititi S. Agung, MS.  
(Tim PSW LP-IPB)*

**Disampaikan pada seminar:  
Keluarga Menyongsong Abad XXI dan Peranannya  
Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Indonesia**

*21-22 September 1993, Kampus IPB Darmaga Bogor*

**PROGRAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN  
KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)  
DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

Oleh :  
Sugiah M. Mahfud  
Sarwititi Sarwoprasodjo Agung

**PENDAHULUAN**

Kebijaksanaan kependudukan menurut GBHN 1993, akan diarahkan pada peningkatan penduduk sebagai pelaku utama dan sasaran pembangunan nasional agar memiliki semangat kerja, budi pekerti, dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa kebijaksanaan pengelolaan kependudukan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, ketrampilan, derajat kesehatan dan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, serta pemeratakan pendapatan. Pembangunan kualitas penduduk yang meliputi kualitas fisik dan non fisik serta pelayanan terhadap penduduk terus ditingkatkan dengan memperhatikan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan hidup, agar potensi penduduk dapat dikembangkan secara optimal.

Kebijaksanaan tersebut di atas tampaknya menjadi tetap sangat relevan, mengingat meskipun Indonesia diakui oleh dunia Internasional sudah berhasil dan memasyarakatkan Gerakan Keluarga Berencana, namun masih terdapat berbagai kendala dalam mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera, antara lain adalah semakin besarnya pertumbuhan angkatan kerja termasuk angkatan kerja wanita, baik di desa maupun di kota. Dari sensus penduduk diketahui bahwa angkatan kerja wanita meningkat, yaitu dari 17,3 juta orang pada tahun 1980 menjadi 26,5 juta orang pada tahun 1990, (Gardiner, 1993). Demikian pula halnya dalam hal partisipasinya dalam angkatan kerja. Pada tahun 1980 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita di desa sebesar 35,2 meningkat menjadi 41,1 pada tahun 1990; sementara di kota TPAK meningkat dari 24,2 pada tahun 1980 menjadi 28,1 pada tahun 1990 (Sri Wahyuni, 1992).

Meskipun terdapat kecenderungan meningkatnya TPAK wanita, baik di desa maupun di kota, namun diketahui bahwa status pekerjaan wanita tergolong buruh, berusaha sendiri dan pekerja keluarga (unpaid family workers). Diketahui bahwa ada 35,7% wanita pekerja keluarga, 30,4% berstatus buruh, dan 33% berusaha tanpa buruh. Sementara pada pria, hanya sebesar 11,3% berstatus peker-

ja keluarga, 37,5% berstatus buruh dan 50% sebagai pengusaha tanpa buruh (Biro Pusat Statistik, 1992). Dengan demikian, kualitas sumber daya wanita relatif tergolong rendah, apalagi kita telah mengetahui dan menyadari betul bahwa dalam hal pendidikan pun wanita relatif tertinggal. Diketahui bahwa sampai tahun 1990, 48% dari penduduk usia kerja yang tak pernah sekolah atau belum menyelesaikan pendidikan SD sebesar 53% pada wanita dan 42% pada pria; dan jika ditambah yang menamatkan SD jumlahnya menjadi 83% pada wanita dan 74% pada pria (Gardiner, 1993).

Sehubungan dengan usaha-usaha melembagakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) di satu pihak, dan menyadari pentingnya meningkatkan produktivitas wanita, khususnya dari lapisan bawah masyarakat, maka selain memberikan pelayanan alat kontrasepsi, BKKBN melaksanakan program "Beyond family planning", antara lain pemberian Kredit Kerja Produktif (KKP). Program KKP ini dimulai sejak 1979/1980 dan dioperasionalisasikan melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor (UPPKA). Setelah lebih dari sekitar 14 tahun, tampaknya perlu dilihat perkembangan program UPPKA, sejauh mana program tersebut mampu melembagakan program NKKBS sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan wanita dan keluarganya. Tulisan ini mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan pengertian, maksud dan tujuan serta sasaran program UPPKA, pelaksanaan program itu serta hasilnya di tingkat individu wanita peserta Kelompok UPPKA beserta keluarganya; serta mengemukakan beragam faktor pendukung dan kendala yang menghambat perkembangannya. Hal penting lainnya, khususnya sehubungan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ingin dicapai.

Tulisan ini mencoba menelaah kemungkinan program UPPKA dapat dijadikan salah satu alternatif bagi pengentasan kemiskinan, mengingat sebagian peserta/anggota adalah wanita dari lapisan bawah (miskin).

## **PROGRAM UPPKA**

### Pengertian

Kelompok UPPKA merupakan kelompok akseptor yang melakukan berbagai kegiatan usaha ekonomis produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga akseptor. Anggotanya terdiri dari akseptor KB (lestari, aktif dan baru, Pasangan Usia Subur (akseptor KB istirahat atau calon akseptor KB), warga masyarakat lainnya yang mempunyai peran serta dalam program KB yang keanggotaannya ditetapkan berdasarkan musyawarah kelompok akseptor.

Kegiatan UPPKA merupakan kegiatan bersama yang mengarah kepada koperasi (pra-koperasi) yaitu dilakukan dari, oleh dan untuk anggota kelompok.

Dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah anggota kelompok untuk mencapai keputusan bersama. Kegiatan UPPKA diharapkan dapat memberikan dukungan (bantuan) kepada kelompok dalam kegiatan posyandu, bina keluarga dan balita, pengayoman terhadap pemakai kontrasepsi, penyediaan obat/alat kontrasepsi, dana sehat dan sebagainya.

#### Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

Program UPPKA secara umum bertujuan untuk menunjang pelaksanaan program gerakan KB Nasional dalam rangka mempercepat pelembagaan dan pembudayaan NKKBS. Adapun tujuan khususnya adalah :

- a. Menumbuhkan dinamika kelompok agar dapat mendorong anggota untuk meningkatkan dan memantapkan kesertaan dalam ber-KB, terutama kesertaan dalam pemakaian alat kontrasepsi yang rasional dan efektif.
- b. Mengisi kegiatan kelompok peserta KB dengan kegiatan ekonomis produktif, sehingga dapat menjamin kelangsungan kelompok tersebut.
- c. Mengembangkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat khususnya para wanita peserta KB untuk meningkatkan peranannya dalam masyarakat maupun keluarga.
- d. Merangsang kemandirian kelompok antara lain dalam melakukan penyediaan dana yang diperoleh untuk menunjang usaha-usaha kelompok yang berkaitan dengan peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya ibu dan anak seperti kegiatan Posyandu, BKB, penanggulangan gejala sampingan (side effect), pengadaan obat/alat kontrasepsi, dana sehat dan lain-lain.
- e. Merangsang anggota kelompok untuk dapat membangun ekonomi keluarga dengan melakukan usaha-usaha produktif, sehingga secara bertahap dapat memenuhi kebutuhan pelayanan KB secara mandiri.
- f. Memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman berorganisasi maupun mengatur administrasi keuangan.
- g. Mempersiapkan para peserta KB agar mampu melakukan kegiatan ekonomi produktif yang semakin berkembang dan mandiri dan mengarahkan kegiatan usaha tersebut dalam wadah koperasi.
- h. Meningkatkan penghayatan ide NKKBS bagi generasi muda putera/puteri terdidik yang ikut mengelola kegiatan UPPKA.

#### Sasaran

Sasaran atau target grup program UPPKA ini mencakup :

- (a) Wanita dalam kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, utamanya di daerah perkotaan dan pedesaan yang kumuh, di desa nelayan, daerah transmigrasi dan desa terpencil serta kantong-kantong kemiskinan lainnya;
- (b) Wanita kepala keluarga;
- (c) Wanita generasi muda agar dapat berperan lebih aktif di berbagai bidang pembangunan;
- (d) Tenaga kerja wanita yang berpendidikan dan berketrampilan rendah, termasuk wanita yang bekerja di luar negeri.

#### Jenis kegiatan

Secara garis besar pelaksanaan program mencakup beberapa hal, yaitu kegiatan latihan, pemantapan kelompok, Peningkatan Mutu Usaha, Penyediaan Bantuan Pinjaman, Kerapihan Administrasi Kelompok, dan Pembinaan

#### 1. Latihan Teknis Umum dan Teknis Khusus UPPKA

Latihan Teknis Umum adalah latihan yang diberikan secara umum kepada peserta latihan UPPKA (Pelatih/Pembina, PPLKB/PLKB, Kader/Pengurus) yang meliputi antara lain : (1) Program terpadu KB-UPPKA, (2) Ketrampilan mengelola usaha dan kewiraswastaan, (3) Perkembangan kelompok, (4) Administrasi, pembukuan dan pelaporan, (5) Pengelolaan permodalan, (6) Pembinaan pengurus dan anggota kelompok, serta (7) Pemecahan permasalahan.

#### 2. Pemantapan Kelompok

Materi yang diberikan dalam pemantapan kelompok ini menekankan pada bimbingan kepada pengurus dan anggota kelompok, dengan tujuan agar peserta memahami aspek-aspek organisasi/kelompok, menyangkut pemahaman akan : tujuan kelompok, kepemimpinan, komunikasi, kejelasan struktur dan fungsi, peran serta anggota dan pengakaran kelompok dalam lingkungannya.

#### 3. Peningkatan Mutu Usaha

Sebagai kelompok yang melakukan kegiatan ekonomis produktif, maka kepada kelompok diberikan materi pembimbingan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kewiraswastaan, faktor-faktor keberhasilan usaha, penentuan jenis usaha, perhitungan usaha-usaha, pemasaran serta bantuan teknis apa yang diperlukan untuk meningkatkan hasil usaha.

#### 4. Penyediaan Bantuan Pinjaman

Bantuan pinjaman bersifat sebagai perangsang untuk meningkatkan hasil

usaha. Bantuan pinjaman dapat berupa uang (berkisar dari pemerintah, lembaga perbankan (pemerintah/swasta); bantuan luar negeri, lembaga swadaya masyarakat dan hasil pemindahan modal yang dalam penggunaannya tidak membedakan tentang tujuan maupun cara pengelolaannya. Jumlah dana UPPKA per desa berkisar antara 0,5 - 2,5 juta rupiah, sementara untuk setiap anggota berkisar antara Rp 10.000,00 - Rp 50.000,00.

#### 5. Kerapihan Administrasi Kelompok

Kelompok yang baik adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan secara rapi dan tertib. Untuk itu kepada kelompok diberikan pengajaran agar peserta memahami administrasi kelompok, pembukuan terhadap kegiatan simpan pinjam dan kegiatan usaha, serta melakukan pelaporan kegiatan kelompok kepada pihak pembinanya.

#### 6. Pembinaan

Pembinaan terhadap pengurus maupun anggota kelompok perlu dilakukan secara terus-menerus untuk menjaga kelangsungan kegiatan kelompok dan masalah-masalah yang dihadapi kelompok. Pembinaan yang dilakukan terutama menyangkut kegiatan UPPKA dan aspek KB.

Selain itu dilakukan kegiatan pengembangan sasaran kelompok UPPKA yang dilakukan dengan cara memindahkan pinjaman modal dari kelompok satu ke kelompok lainnya (revolving). Kelompok-kelompok tersebut diusahakan berada dalam wilayah yang berdekatan (dalam satu usaha).

### HASIL DAN DAMPAK UPPKA

Dalam bab ini akan dikemukakan hal-hal yang berkenaan dengan (a) ketepatan sasaran penerima paket program UPPKA, (b) pencapaian tujuan UPPKA di tingkat kelompok UPPKA, (c) pencapaian tujuan tujuan di tingkat individu dan (d) dampak program UPPKA terhadap lingkungannya, baik keluarganya sendiri ataupun masyarakat luas dimana mereka tinggal. Dalam uraian ini kami lebih banyak mengemukakan hasil survey dan kasus studi di Jawa, Bali dan Sulawesi Utara. Selanjutnya, di bawah ini akan diuraikan hal-hal tersebut secara lebih rinci.

#### (1) Ketepatan sasaran penerima paket Program UPPKA

Seperti diketahui, penerima paket program UPPKA seharusnya adalah

wanita, baik sebagai anggota keluarga dari lapisan bawah, kepala keluarga, wanita remaja putri maupun yang berpendidikan dan berkecakupan rendah. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penerima paket program sebagian besar wanita sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Namun terdapat kasus dimana di Sulawesi Utara sebagian besar peserta adalah pria. Bahkan diketahui ada di antara pengurus kelompok tidak berjenis kelamin wanita tetapi pria.

Masalah tersebut, tidak terlepas dari dua hal yaitu peluang berusaha yang tersedia bagi wanita dan pilihan kelayakan pengembangan usaha. Bagi anggota wanita yang tidak mempunyai usaha serta kecakupan usaha, akan cenderung memanfaatkan pinjaman yang diperoleh untuk modal usaha suaminya. Dan bagi anggota yang walaupun mempunyai usaha tetapi tetap menggunakan pinjaman untuk tambahan modal usaha suaminya. Keputusan tersebut didasari pertimbangan bahwa tambahan modal tersebut memang dibutuhkan untuk usaha suaminya daripada usahanya atau lebih menguntungkan apabila dimanfaatkan oleh suaminya.

## (2) Pencapaian tujuan di tingkat kelompok

Untuk menelaah sejauh mana tujuan UPPKA di tingkat kelompok berhasil, maka yang dilihat adalah dinamika kelompok UPPKA itu sendiri. Dinamika kelompok UPPKA di tingkat kelompok yang berhasil, maka yang dilihat adalah dinamika kelompok UPPKA itu sendiri. Dinamika kelompok UPPKA sangat heterogen kualitasnya, dan ini sangat tergantung pada faktor internal maupun eksternal kelompok UPPKA itu sendiri.

Dalam hal faktor internal tampaknya figur pengurus sangat sentral. Di banyak tempat diketahui bahwa pada kasus kelompok UPPKA yang tergolong dinamis, diketahui pengurus kelompoknya tergolong pengurus yang mampu berkomunikasi, jujur dan wanita. Sebaliknya, banyak kasus kelompok UPPKA yang kurang berhasil itu disebabkan lemahnya tokoh pengurus kelompok. Hal ini tampaknya berhubungan dengan sejarah pemilihan pengurus yang cenderung atas dasar "penunjukan" bukan pemilihan secara demokratis; serta cenderung tak ada kaderisasi.

Faktor lain dari dinamika kelompok adalah jumlah dan homogenitas anggota kelompok. Diketahui bahwa jumlah anggota kelompok UPPKA ternyata menunjukkan hal yang positif, dalam arti ada "kesesuaian". Yang dimaksud dengan kesesuaian di sini terutama kemudahan dari pengurus kelompok yang memperbolehkan mereka untuk meminta pinjaman sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dinilai peserta sangat positif, mengingat bagi lapisan bawah kredit yang mereka peroleh tak hanya untuk digunakan bagi kegiatan produktif saja,

wanita, baik sebagai anggota keluarga dari lapisan bawah, kepala keluarga, wanita remaja putri maupun yang berpendidikan dan berkecakupan rendah. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penerima paket program sebagian besar wanita sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Namun terdapat kasus dimana di Sulawesi Utara sebagian besar peserta adalah pria. Bahkan diketahui ada di antara pengurus kelompok tidak berjenis kelamin wanita tetapi pria.

Masalah tersebut, tidak terlepas dari dua hal yaitu peluang berusaha yang tersedia bagi wanita dan pilihan kelayakan pengembangan usaha. Bagi anggota wanita yang tidak mempunyai usaha serta kecakupan usaha, akan cenderung memanfaatkan pinjaman yang diperoleh untuk modal usaha suaminya. Dan bagi anggota yang walaupun mempunyai usaha tetapi tetap menggunakan pinjaman untuk tambahan modal usaha suaminya. Keputusan tersebut didasari pertimbangan bahwa tambahan modal tersebut memang dibutuhkan untuk usaha suaminya daripada usahanya atau lebih menguntungkan apabila dimanfaatkan oleh suaminya.

## (2) Pencapaian tujuan di tingkat kelompok

Untuk menelaah sejauh mana tujuan UPPKA di tingkat kelompok berhasil, maka yang dilihat adalah dinamika kelompok UPPKA itu sendiri. Dinamika kelompok UPPKA di tingkat kelompok yang berhasil, maka yang dilihat adalah dinamika kelompok UPPKA itu sendiri. Dinamika kelompok UPPKA sangat heterogen kualitasnya, dan ini sangat tergantung pada faktor internal maupun eksternal kelompok UPPKA itu sendiri.

Dalam hal faktor internal tampaknya figur pengurus sangat sentral. Di banyak tempat diketahui bahwa pada kasus kelompok UPPKA yang tergolong dinamis, diketahui pengurus kelompoknya tergolong pengurus yang mampu berkomunikasi, jujur dan wanita. Sebaliknya, banyak kasus kelompok UPPKA yang kurang berhasil itu disebabkan lemahnya tokoh pengurus kelompok. Hal ini tampaknya berhubungan dengan sejarah pemilihan pengurus yang cenderung atas dasar "penunjukan" bukan pemilihan secara demokratis; serta cenderung tak ada kaderisasi.

Faktor lain dari dinamika kelompok adalah jumlah dan homogenitas anggota kelompok. Diketahui bahwa jumlah anggota kelompok UPPKA ternyata menunjukkan hal yang positif, dalam arti ada "kesesuaian". Yang dimaksud dengan kesesuaian di sini terutama kemudahan dari pengurus kelompok yang memperbolehkan mereka untuk meminta pinjaman sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dinilai peserta sangat positif, mengingat bagi lapisan bawah kredit yang mereka peroleh tak hanya untuk digunakan bagi kegiatan produktif saja,



akan tetapi juga untuk kebutuhan konsumsi atau pendidikan sekolah anaknya.

Dalam hal yang berhubungan dengan struktur kelompok, diketahui bahwa pada banyak kasus kelompok UPPKA yang tak dinamis, hubungan antara pengurus dan anggota kurang begitu baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi di antara mereka yang berpangkal dari tidak jelasnya struktur tugas kelompok.

Kegiatan kelompok UPPKA yang utama adalah kegiatan simpan pinjam. Kegiatan ini umumnya dapat dikategorikan berhasil, karena memungkinkan anggota --sebagian besar secara individual-- dapat melakukan kegiatan produktif yang memungkinkan kelangsungan pemenuhan kebutuhan pokok/sehari-hari bagi rumah tangga mereka. Namun demikian, kerena peminjaman modal secara bergulir, maka terdapat gejala adanya rasa iri di kalangan anggota yang belum memperoleh kredit kepada mereka yang telah memperolehnya; hal ini cenderung menguat, manakala terdapat anggota yang telah mendapat giliran memperoleh kredit terlebih dahulu akan tetapi orang yang bersangkutan tidak membayar; sehingga kredit cenderung macet. Walaupun demikian, tampaknya kesesuaian pencapaian kesesuaian tujuan kelompok ini mempercepat proses difusi inovasi program UPPKA, sehingga jumlah anggota kelompok juga cenderung meningkat (Lampiran 3).

### (3) Pencapaian Hasil di Tingkat Individu :

Pencapaian hasil di tingkat individu dilihat dari sejauh mana perubahan perilaku para peserta program UPPKA, baik yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap positif serta aspek ketrampilan atau tindakan/ketrampilan.

Perubahan aspek sikap para peserta kelompok akseptor terlihat dari motivasi keikutsertaan anggota kelompok dalam program UPPKA untuk mensukseskan program pemerintah.

Dalam hal perubahan responden diketahui bahwa peserta/anggota umumnya tidak tahu dengan persis pengertian konsep UPPKA dan NKKBS. Pemahaman mereka mengenai program UPPKA masih terbatas pada pengetahuan bahwa UPPKA adalah program yang memberikan uang untuk dipinjamkan kepada wanita akseptor. Dalam hal perubahan pengetahuan, diketahui bahwa menurut penuturan wanita peserta UPPKA, mereka mengetahui informasi program UPPKA dari petugas KB Desa (Pos KB Desa), aparat pimpinan desa dan pemukanya, serta dari pengurus itu sendiri.

Dalam hal perubahan tindakan/peningkatan ketrampilan peserta bahwa dari studi kasus diketahui bahwa persentase CU/PUS di lokasi studi sudah menca-



pai fase V. Kemantapan anggota kelompok ber-KB semakin diperkuat oleh adanya program kredit UPPKA; hal ini terlihat dengan beralihnya mereka kepada pemakaian alat kontrasepsi yang lebih andal yaitu tubektomi atau IUD. Hal ini disebabkan kebanyakan kelompok memasyarakatkan hanya akseptor IUD yang dapat memperoleh pinjaman. Namun demikian, untuk daerah yang relatif masih kuat dipengaruhi oleh nilai keagamaan ternyata jumlah peminjam menjadi sedikit. Sebaliknya di kelompok lain yang tidak mensyaratkan IUD, asalkan akseptor KB (apapun jenis kontrasepsinya) ternyata lebih berhasil menarik banyak pemakai kredit.

#### (4) Dampak di Tingkat Keluarga

Motivasi utama anggota dalam mengikuti kegiatan kelompok adalah untuk memperoleh pinjaman uang. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan kredit yang mudah dan murah. Hampir di setiap daerah penelitian banyak dijumpai masalah pelepas uang dengan harga yang relatif tinggi. Di lain pihak anggota kesulitan memanfaatkan jasa bank karena persyaratannya relatif rumit.

Dengan demikian, keberadaan UPPKA sangat membantu mereka untuk memperoleh kredit yang murah dan mudah.

Menurut peraturan, pinjaman diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan modal. Tambahan modal ini berguna, terlebih bagi anggota yang mempunyai usaha dengan skala relatif kecil.

Walaupun pada umumnya sumbangan modal dari UPPKA relatif kecil secara kuantitatif, adanya hanya sekitar 3% dalam satu kali produksi, tetapi mempunyai makna yang relatif penting terutama pada usaha kecil.

Jumlah penerimaan, pengeluaran usaha anggota dapat dilihat pada Lampiran 2. Apabila ditinjau dari segi efisiensi usaha, dengan melihat R/C rasio, bisa dikatakan usaha dari kegiatan UPPKA ini cukup menguntungkan karena nilai R/C ratio lebih dari satu (Lampiran 2). Walaupun demikian, usaha-usaha tersebut tidak selalu bisa didorong untuk lebih banyak menyerap kredit dari kelompok UPPKA, karena keterbatasan pengembangan usaha sebagai akibat keterbatasan pasar.

Bagi anggota kelompok lain, pinjaman dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif seperti perbaikan rumah, biaya pendidikan anak, serta pemenuhan kebutuhan pangan serta biaya pengobatan. Walaupun menurut ketentuan penggunaan pinjaman diharapkan sebagai modal usaha, nampaknya tidak mudah, karena masalah keterbatasan lapangan kerja dan banyak para anggota yang jenis usahanya tidak memerlukan tambahan modal. Di lain pihak, pin-

jaman modal relatif kecil untuk jenis-jenis usaha yang relatif besar karena batasan maksimum Rp 50.000,00 perorang.

Dari sudut kesejahteraan sosial, kelompok UPPKA memberikan jaminan sosial bagi anggotanya terutama pada saat anggota mendadak mengalami kesulitan keuangan (karena musibah).

#### (5) Dampak di Tingkat Masyarakat

Dampak di tingkat masyarakat terlihat dari semakin banyaknya kelompok baru yang terbentuk karena perkembangan modal dari kelompok UPPKA sebelumnya dapat ditularkan (revolving fund) kepada kelompok yang baru dibentuk. Kondisi saat ini dapat dilihat pada Lampiran 3, dimana pada akhir Juli 1993 tercatat adanya peningkatan jumlah kelompok sebesar 4.381 kelompok.

#### PENUTUP

Melalui program UPPKA, proses pelembagaan NKKBS tergolong relatif berhasil, terlihat dari meningkatnya pengetahuan wanita peserta kelompok UPPKA, baik dalam hal konsep NKKBS yang menyangkut informasi pentingnya ber-KB dan menggunakan alat kontrasepsi yang relatif efektif; selain itu juga peningkatan pengetahuan dalam hal pengelolaan usaha produktif, terutama pembuahan untuk kegiatan simpan pinjam.

Di samping itu perubahan pengetahuan tersebut juga diikuti oleh pembentukan sikap positif mereka terhadap pentingnya NKKBS. Peningkatan pengetahuan dan pembentukan sikap positif ini berhubungan dengan tindakan atau peningkatan ketrampilan peserta, yaitu mereka mampu mengelola kredit untuk dijadikan kegiatan produktif yang mampu memberi kredit untuk dijadikan kegiatan produktif yang mampu memberi peluang bekerja sekaligus peningkatan pendapatan, sekalipun jumlahnya sangat heterogen tergantung jenis usaha yang dikelola peserta. Dengan kata lain, program UPPKA mampu memenuhi kebutuhan praktis gender.

Lebih lanjut, UPPKA tampaknya mampu meningkatkan akses wanita baik terhadap informasi mengenai NKKBS dan usaha produktif serta akses terhadap kredit, tapi juga akses terhadap pasar; di samping itu juga meningkatkan kemampuan peserta dalam proses pengambilan keputusan (kontrol) terhadap beragam sumberdaya, khususnya bagi kegiatan produktif dan kegiatan berorganisasi atau dengan kata lain mampu meningkatkan kemandirian (empowerment) wanita baik di tingkat keluarga maupun di tingkat kelompok/masyarakat.

Karena jangkauannya yang cukup luas dan jenis kegiatannya bersifat income generating, program UPPKA mempunyai prospek yang baik sebagai salah

satu upaya pengentasan kemiskinan.

Sedangkan, sebagai upaya pengentasan kemiskinan, terutama untuk kalangan yang paling bawah, perlu dipertimbangkan bentuk-bentuk usaha yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan jenis usaha yang sebaiknya mempunyai ciri menghasilkan pendapatan atau apabila jenis usaha tidak segera menghasilkan pendapatan hendaknya dibarengi dengan pinjaman untuk keperluan konsumtif dengan bunga ringan atau tanpa bunga.

Karena adanya tuntutan bahwa di masa yang akan datang kelompok semakin terbuka, upaya-upaya pembinaan kelompok tidak hanya dari sudut kepentingan ekonomis berupa perkembangan modal, tetapi juga pengembangan kepemimpinan di tingkat kelompok, sehingga upaya pengentasan kemiskinan ini tidak hanya memberikan pengaruh pada peningkatan pendapatan tetapi juga perbaikan kondisi struktural.

Untuk pengembangan lebih lanjut, kelompok yang ada tidak hanya didorong untuk pengembangan usaha simpan pinjam saja, tetapi juga usaha seperti pemenuhan kebutuhan konsumsi anggota. Pembentukan koperasi serba usaha bagi anggotanya merupakan salah satu alternatif. Selain itu perlu digalakkan berbagai kegiatan yang bersifat mendinamisir kelompok seperti kegiatan pertemuan kelompok untuk memecahkan berbagai permasalahan mereka.

Dalam jangka panjang, apabila kelompok berkembang lebih maju pengelolaan harus dilakukan secara lebih profesional, tidak hanya dalam aspek teknis usaha tetapi juga pemberian honor bagi para pengurus secara lebih layak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1993. GBHN dan Tap-Tap MPR 1993. Bahan Penataran dan Bahan Referensi.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1989. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor KB (UPPKA). Buku I. Pedoman Umum KB-UPPKA. Jakarta.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1993. Laporan Umpan Balik Pengendalian Lapangan bulan Juli 1993. Pusat Pengolahan Data dan Komputer, BKKBN, Jakarta.
- Gardiner, Oey. 1993. Pengembangan Kualitas dan Peningkatan Peran serta Angkatan Kerja Wanita Dalam Pembangunan Nasional. Masalah pada Konperensi Kependudukan Indonesia 1993. Kantor Menteri Negara Kependudukan /Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- Pudjiwati Sajogyo dan Tutut Sunarminto, 1989. Peningkatan Status Sosial Wanita Peserta KB dan Keluarganya, melalui proyek UPPKA : Studi Evaluasi pada Masyarakat Jawa, Bali dan Sulawesi Utara Periode 1986/1987 sampai 1988/1989. Makalah disampaikan dalam Seminar Kegiatan UPPKA diselenggarakan oleh BKKBN Pusat di Jakarta, tanggal 8 Juli 1989.
- Suyono, Haryono. 1993. Pokok-Pokok Pikiran Untuk Menyusun Kebijakan dan Upaya Untuk Mewujudkan Penduduk sebagai Kekuatan dan Sasaran Pembangunan Selama Repelita VI. Makalah pada Konperensi Kependudukan 1993. Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- Sugandi, Mien. 1993. Peningkatan Peranan Wanita Indonesia Sebagai Pelaku dan Sasaran Pembangunan dalam era Globalisasi serta Kebijakan Selama PJPT II dan Repelita VI. Makalah Pada Konperensi Kependudukan Indonesia 1993. Kantor Menteri Negara Kependudukan /Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- Sri Wahyuni, 1992. Analisis Statistik Terhadap Ketenagakerjaan Wanita Pedesaan Jawa Barat. Dalam Mies Grijns dkk. (Ed.), Gender, Marginalisasi dan Industri Pedesaan. Institute of Social Studies-The Hague in Cooperation with Akatiga Foundation, Centre for Social Analysis, Bandung.
- Vitayala, A.H.Syafri, 1989. Analisa Hasil Evaluasi Kegiatan Wanita Akseptor

pada Program Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah tangga. Suatu strategi Memperkuat Proses Kestinambungan Pemahaman Metode Keluarga Berencana yang Nyata pada Masyarakat : Kasus Studi di Masyarakat Bali. Pusat Studi Pembangunan-LP, Bogor.

Lampiran 1  
Perkembangan Jumlah Anggota per Kelompok UPPKA Kasus, 1987-1988

Kelompok	Tahun Pembentukan	Jumlah Anggota		Perkembangan	
		Awal	Saat Penelitian	N/K(+/-) *)	(%)
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
<b>Bali, 1987</b>					
1. Eka Triguna	1985	20	85	+ 65	325.0
2. Bunga	1983	10	37	+ 27	27.0
3. Kesiut Kancin	1981	40	45	+ 5	12.5
4. Bina Sejahtera	1980	234	237	+ 3	1.3
5. Banjar Kerung	1981	20	20	0	0.0
6. Banjar Bale/Bale Agung	1981	68	68	0	0.0
7. Banjar Delod/Bale	1978	21	49	+ 28	133.3
8. Kelapa Indah	1983	102	110	+ 8	7.8
<b>Jawa Barat, 1987</b>					
1. Teratai Mekar	1982	47	79	+ 32	68.1
2. Melati II	1983	35	45	+ 10	28.6
3. Bina Lestari	1983	15	66	+ 51	340.0
4. Bina Mawar I	1983	17	48	+ 31	182.3
5. Warni Asih II	1984	55	59	+ 4	7.3
6. Gemah Ripah	1984	16	32	+ 16	100.0
7. UB. Mekar Hati	1986	53	66	+ 13	24.0
<b>Jawa Tengah, 1987/89</b>					
1. PKB Ibu II	1981	23	37	+ 14	60.9
2. PKB Subur III	1984	0	24	0	0.0
3. UBPKP Mardi Rahayu	1980	27	65	+ 38	140.7
4. UBPKP Mardi Rahayu II	1984	58	65	+ 7	12.1
5. Lestari Rahayu	1984	30	37	+ 7	12.1
<b>Jawa Timur, 1988</b>					
1. Mlorah	1984	43	410	+367	853.5
2. Mojoagung	1984	57	147	+ 90	157.9
3. Bendosari	1983	16	213	+197	12.3
4. Tawangrejo	1984	51	159	+108	200.2
5. Sukoharjo	1985	100	129	+ 29	29.0
6. Cawang	1983	173	238	+ 55	31.8
7. Pademawu					
<b>Sulawesi Utara, 1988</b>					
1. Berusaha	1987	23	23	0	0.0
2. Sejahtera	1987	30	30	0	0.0
3. Putri Trampil	1986	10	24	+ 14	14.0
4. Manggis	1986	20	20	0	0.0
5. Heliano	1987	23	23	0	0.0
6. Kartini	1985	46	27	- 19	-41.3
7. Mawar	1987	20	20	0	0.0
8. Unduman	1987	17	17	0	0.0

Lampiran 2  
Jenis Usaha Produktif Kelompok UPPKA Kasus dan R/C Ratio,  
Pengeluaran dan Penerimaan

No.	Jenis Usaha	R/C Ratio	Pengeluaran (Rp)	Penerimaan (Rp)
1.	Ternak Babi	1,73	37000	64000
2.	Pembuatan Kelapa	1,60	37500	60000
3.	Sayuran/buah	1,73	150000	260000
4.	Pengrajin Bambu	1,23	32500	40000
5.	Dagang kue	1,06	1275000	1350000
6.	Usaha Minyak Kelapa	1,27	31500	40000
7.	Kredit Kain	1,27	181250	230000
8.	Ternak Itik	1,63	27650	45000
9.	Usaha Bordir	1,13	266000	300000
10.	Pertenenan	2,24	26800	60000
11.	Batu Bata	2,65	75320	200000
12.	Jahit Menjahit	12,35	8500	105000
13.	Pembuat Emping	1,43	175482	251000
14.	Penggali Pasir	5,11	27094	138600
15.	Pembuat Rengginang	1,56	62500	97500
16.	Pengrajin Golok	1,75	21760	38000
17.	Bandar Padi	1,04	6467800	6720000
18.	Warung	1,25	180000	225000
19.	Pedagang Bakso	1,26	345675	436400
20.	Pembuat Sapu	1,87	13000	24375
21.	Pedagang Telur	1,39	480000	668250
22.	Membuat Gaplek	3,74	26700	100000
23.	Industri Tempe	1,57	732700	1150600
24.	Produksi Kerudung	1,48	73500	108000
25.	Warung Nasi/Menetas	1,56	1014375	1588500
26.	Salon	2,02	8691	19250
27.	Dagang Sprotan	1,25	3000000	3750000
28.	Dagang Pisang	1,30	150000	195000
29.	Pedagang Pengumpul kelapa	1,30	420000	540000
30.	Penjual Toge	1,40	245250	348750
31.	Penjahit	7,00	15000	105000
32.	Pengusaha Batik	2,51	280500	704000